



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768  
SITUS: [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)

007361

Nomor : 05 / PANSEL-JPT / PEG.02.01 / 04 / 2018 Jakarta, 6 April 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pengumuman Perpanjangan Jadwal Seleksi Terbuka Pengisian  
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Tahun 2018

Kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Kepala Polisi Republik Indonesia;
4. Panglima TNI;
5. Para Gubernur; dan
6. Para Walikota/Bupati.

Bersama ini dengan hormat, kami informasikan bahwa Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018, yang semula penutupan pendaftaran berakhir pada tanggal 2 April 2018, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan pengumuman dimaksud kepada seluruh pejabat di lingkungan instansi masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat serta diunduh di halaman website <http://www.kemenkopmk.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Panitia Seleksi,  
  
Y.B. Satya Sananugraha

Tembusan :

1. Menko PMK (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi ASN

0007942

08 MAY 2018

11 APR 2018

Daftar Lampiran

Nomor : 05 / PANSEL-JPT / PEG.02.01 / 04 / 2018

Tanggal : 6 April 2018

1. Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kemenko Bidang Perekonomian;
3. Kemenko Bidang Kemaritiman;
4. Kementerian Sekretariat Negara;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Agama;
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kementerian Keuangan;
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Kementerian Kesehatan;
14. Kementerian Sosial;
15. Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Kementerian Perindustrian;
18. Kementerian Perdagangan;
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Kementerian Perhubungan;
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Kementerian Pertanian;
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Kementerian Pariwisata;
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
35. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
36. Sekretariat Kabinet;
37. Badan Pemeriksa Keuangan;
38. Arsip Nasional Republik Indonesia;
39. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
40. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
41. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
42. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
43. Badan Standardisasi Nasional;
44. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

45. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
46. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
47. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi;
48. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
49. Badan Pusat Statistik;
50. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
51. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
52. Badan Informasi Geospasial;
53. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
54. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
55. Badan Kepegawaian Negara;
56. Badan Intelijen Negara;
57. Lembaga Ketahanan Nasional;
58. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
59. Badan Narkotika Nasional;
60. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
61. Badan SAR Nasional;
62. Lembaga Administrasi Negara;
63. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
64. Lembaga Sandi Negara;
65. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
66. Gubernur seluruh Indonesia; dan
67. Walikota/Bupati seluruh Indonesia